

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan desa sebagai unit terkecil pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan mengurus tata pemerintahannya sendiri (otonomi desa), termasuk pengelolaan keuangan, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain dalam undang-undang tersebut, hal lain yang mendasari otonomi desa adalah adanya Nawa Cita yang dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014-2019, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah yang dimulai dari desa (Hanafi, 2019). Dengan adanya hal tersebut, pemerintah desa harus dapat mengelola keuangan desa dengan melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan pelaporan realisasi penggunaan anggaran.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus sesuai dengan Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 pendapatan desa terdiri atas tiga kelompok yaitu (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong; (2) Kelompok transfer meliputi dana desa, hasil pajak, daerah dan retribusi Kabupaten yang masing-masing desanya mendapatkan biaya sebesar 10%, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan keuangan APBD

Kabupaten; (3) Kelompok pendapatan lain-lain, yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa lain-lain. Ketiga hal tersebut menjadi komponen dalam Pengalokasian Dana Desa yang dimana sudah semestinya setiap desa memenuhi tiga komponen tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mulai diberikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 dengan kisaran setiap Desa memperoleh kurang lebih Rp 1 Milyar tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis, dengan demikian Pemandagri mengharuskan setiap desa melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Laporan Keuangan yang baik harus memenuhi beberapa tahapan yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan kegiatan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan desa harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada, tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus penyalahgunaan dana desa karena pengetahuan dari warga desa mengenai anggaran masih minim sehingga banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima cukup banyak dan seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Gayatri dan Latrini, 2018). Selain disalah gunakan banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

(Mardiasmo, 2009). Pernyataan-pernyataan diatas juga sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 58 yang memiliki arti :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Berdasarkan uraian ayat di atas, kita sebagai umat beragama wajib menyampaikan amanat dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam hal menyampaikan pelaporan keuangan desa di mana pelaporan keuangan desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan masyarakat desa harus berkualitas dan mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Dilihat dari BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kabupaten Bantul (2018) bahwa dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2018 yang dimuat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Provinsi Daerah Yogyakarta mengemukakan hasil bahwa pemeriksaan keuangan tahun 2018 berstatus wajar tanpa pengecualian dengan catatan kelemahan pada sistem pengendalian internal berupa : penyelesaian piutang yang berpotensi tidak tertagih belum memadai, pengelolaan persediaan belum memadai, penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bantul belum tertib, belanja barang jasa berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat

dianggarkan pada belanja pegawai senilai Rp.219.900.000,00, dan tidak terdapat teknanisme pelaporan dan pengesahan atas penerimaan dana bantuan non APBD yang langsung diterima oleh *Continuing Professional Development (CPD)*.

Melihat dari penelitian sebelumnya menurut (Riyanita dkk 2020) yang meneliti tentang analisis pengaruh sistem pengendalian internal, pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada perangkat desa di kabupaten sleman), beliau mengungkapkan bahawa variabel sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nugroho (2020) yang meneliti tentang sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa kecamatan cisaat kab sukabumi, beliau mengungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Desa Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dapat dikatakan semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Desa Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi semakin baik pula hasil dari kualitas laporan keuangan Desa. Widarsono dan Nurul (2013) yang meneliti tentang pengaruh efektivitas penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, beliau mengungkapkan bahawa terdapat pengaruh yang positif terhadap efektivitas penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal menjadi beberapa komponen yang

sangat berpengaruh dalam menyusun laporan keuangan yang dimana akan berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Riyanita dkk (2020) Pemanfaatan teknologi merupakan penggunaan teknologi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, dalam hal ini mendokumentasikan dan mencatat transaksi hingga menyusun laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Saat ini penggunaan teknologi informasi pada Aparat Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Bantul sudah cukup baik di lihat dari table Survey Kepuasan Masyarakat (SKP), penjelasan di atas juga di dukung dengan adanya hasil dari table yang di upload pada <https://skm.bantulkab.go.id/>.

Tabel 1.1
Organisasi Perangkat Desa (OPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	SKPD	IKM	Nilai
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	84.88	B (Baik)
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	88.38	A (Sangat Baik)
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	88.21	B (Baik)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85.2	B (Baik)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.81	B (Baik)
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84.14	B (Baik)
7	Dinas Kebudayaan	88.39	A (Sangat Baik)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88.54	A (Sangat Baik)
9	Dinas Kesehatan	84.86	B (Baik)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	89.83	A (Sangat Baik)
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (KUKMP)	87.92	B (Baik)
12	Dinas Lingkungan Hidup	83.93	B (Baik)
13	Dinas Pariwisata	94.24	A (Sangat Baik)
14	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP)	89.99	A (Sangat Baik)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	87.25	B (Baik)
16	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	94.33	A (Sangat Baik)
17	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87.39	B (Baik)
18	Dinas Perdagangan	87.71	B (Baik)
19	Dinas Perhubungan	90.5	A (Sangat Baik)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	87.36	B (Baik)
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	85.32	B (Baik)
22	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	87.65	B (Baik)
23	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P3A)	89.54	A (Sangat Baik)
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	84.4	B (Baik)
25	Inspektorat	78.93	B (Baik)
26	RSUD. Panembahan Senopati	87.59	B (Baik)
27	Satuan Polisi Pamong Praja	80.18	B (Baik)
28	Sekretariat DPRD Kab. Bantul	86.84	B (Baik)

Sumber : <https://skm.bantulkab.go.id/?tahun=2019>

Selain sistem pengendalian internal dan teknologi informasi sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sumberdaya manusia juga merupakan faktor yang sangat membengaruhi kualitas laporan keuangan. Arighi dan

Darwanis (2020) yang meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan desa (studi pada desa di kabupaten aceh selatan), beliau mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan desa di kabupaten aceh selatan dan juga beliau mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan desa.

Karsana dan Suaryana (2017) yang meneliti tentang pengaruh efektivitas penerapan *System Application and Processing*, Kompetensi sumberdaya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli, beliau mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Menurut Indriasari dan Widiastuti (2008), kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki individu berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada individu tersebut. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu ditingkatkannya Sumberdaya Manusia yang faham akan akuntansi pemerintah dan operasional tentang pemerintahan.

Kompetensi sumber daya manusia dapat memengaruhi terhadap baik buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sumber daya yang dimaksudkan adalah yang mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan

standar dan yang memahami jalannya akuntansi pemerintahan, baik dalam hal keuangan daerah maupun operasional pemerintahan. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang memahami standar penyusunan laporan keuangan pemerintah menjadikan laporan keuangan tersebut belum dapat dikatakan berkualitas.

Arighi dan Darwanis (2020) yang meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan desa (studi pada desa di Kabupaten Aceh Selatan), beliau kembali mengungkapkan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara baik serta optimal. Tampubolon dan Hasibuan (2019) yang meneliti tentang pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah daerah di wilayah provinsi DKI Jakarta), beliau mengungkapkan bahwa Variabel kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta selatan dan juga beliau mengungkapkan bahwa Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sumberdaya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi sebuah organisasi yang dimana sebagai penggerak

untuk mencapai tujuan organisasi begitu juga dengan desa harus memiliki sumberdaya manusia yang baik agar bisa mencapai tujuan dari desa tersebut, sebuah desa harus memiliki laporan keuangan yang baik dikatakan baik ketika kualitas dari laporan keuangan itu sudah mencapai standarnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Dari uraian diatas maka penelitian ini akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Aparatur Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Bantul)”**. Penelitian ini merupakan penelitian refleksi dari penelitian Riyanita dkk (2020) dan Triyanto (2013). Adanya penambahan variabel independen yang diteliti dengan peneliti sebelumnya yaitu kompetensi sumber daya manusia, Penambahan variabel tersebut karena ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian ini di lakukan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga terdapat perbedaan waktu penelitian yang dilakukan.

B. Batasan Masalah

Karena adanya batasan pengetahuan waktu maka penelitian ini berfokus dalam meneliti sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan. Maka dari itu berikut batasan masalah dalam penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada Aparatur Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Bantul.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner
3. Penelitian ini berfokus pada pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
- c. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris mengenai hubungan antara:

- a. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas keuangan.
- b. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
- c. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas keuangan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan isi dari batasan masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini memiliki manfaat yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam akuntansi sektor publik Indonesia, khususnya pada topik yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan bagi perangkat desa terkait penyusunan dan pertanggungjawaban dalam membuat laporan keuangan

yang lebih ketat serta membuat kebijakan mengenai Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1. Bagi Aparat Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan pengetahuan tentang kualitas laporan keuangan yang baik dan benar.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam lingkup Laporan Keuangan desa yang memiliki kualitas laporan keuangan yang baik.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang dan sebagai bahan perbandingan penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama.